

ABSTRAK

Seky Prasdhika Pebransha, 1183030071. *Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di Badan Kepegawaian Negara Kanreg III Bandung dalam rangka Menjalankan Pelayanan Prima menurut Siyasah Dusturiyah*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsinya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Lembaga ketatanegaraan tentu mempunyai fungsi serta tugas-tugas yang salah satunya pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dengan diterapkan kebijakan *e-Government* penggunaan media teknologi informasi secara electronic demi terwujudnya pelayanan prima dan menumbuhkan partisipasi masyarakat yang mandiri. terdapat kendala dalam pelayanan publik berbasis *e-Government* ini masih belum optimal dilihat dari beberapa indikasi yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui sejauh mana implementasi *e-Government* di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung berdasarkan INPRES No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* dalam rangka menjalankan pelayanan prima. *Kedua*, untuk mengetahui aspek penghambat implementasi INPRES No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* di Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung dalam rangka menjalankan pelayanan prima. *Ketiga*, untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan *e-Government* dalam rangka menjalankan pelayanan prima.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik George Edwards III dengan istilah *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang mengemukakan empat model yang mempengaruhi yaitu, sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder, dan dalam pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, komunikasi, dokumentasi.

Hasil penelitian menemukan beberapa fakta dan dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, Implementasi *e-Government* dalam rangka menjalankan pelayanan prima di lingkup internal Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung menunjukkan bahwa telah melaksanakan *e-Government* serta sudah dilakukan dengan baik. *Kedua*, kendala dalam penyampaian informasi tentang pelayanan publik berbasis *e-Government* kepada masyarakat masih kurang. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang pelayanan publik berbasis *e-Government* ini. Mekanisme pelayanan publik yang berbasis digital ini masih tumpang tindih dengan pelayanan secara manual, jadi masih belum sepenuhnya berbasis *e-Government*. *Ketiga*, jika ditinjau dari siyasah dusturiyah Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung sudah melaksanakan dengan baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang berisi prinsip pelayanan publik. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung sudah memberikan inovasi untuk pelaksanaan *e-Government*, namun untuk pelaksanaannya belum optimal dan masih terdapat beberapa kekurangan.

Kata kunci: Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Bandung, Implementasi Kebijakan, *e-Government*